

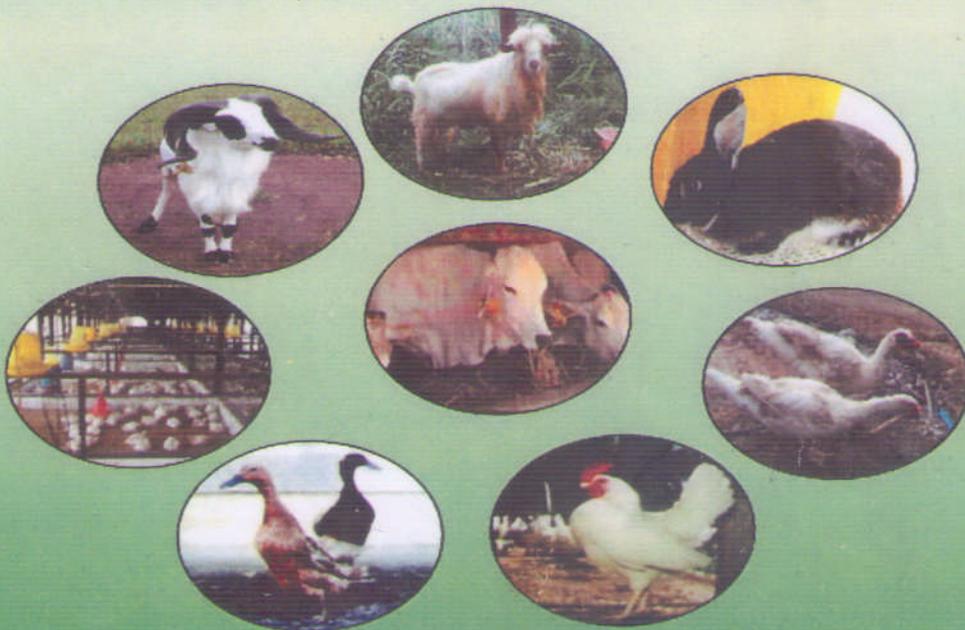
ISBN : 979-704-485-8

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2006

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETERNAKAN
DI BIDANG AGRIBISNIS UNTUK MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN**

Semarang, 3 Agustus 2006



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETERNAKAN DI BIDANG AGRIBISNIS UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Semarang, 3 Agustus 2006

Penyuting : Bambang Suryanto
Isbandi
Bambang Mulyatno S.
Bambang Sukamto
Edy Rianto
Anang M. Legowo

Penyuting Pelaksana : Edy Prasetyo
Titik Ekowati
Mukson
Migie Handayani
Siwi Gayatri
Agus Setiadi
Hery Setiwan

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006

Dipublikasi pada seminar Nasional Prosiding ISBN: 979-704-485-8
Pemberdayaan Masyarakat Peternakan di Bidang Agribisnis untuk Mendukung Ketahanan Pangan
Semarang 3 Agustus 2006
Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang

KENDALA KECUKUPAN DAGING 2010

R. Tawaf dan Sondi Kuswaryan

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Program Kecukupan Daging (PKD) 2010 yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Peternakan mengacu kepada tiga program Deptan yaitu : Program Pengembangan Agribisnis (PPA), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPKP) dan Program Ketahanan Pangan (PKP) dimana dalam program ini diharapkan peran produksi daging sapi dalam negeri mampu memberikan kontribusi sebesar (90-95%). Saat ini, diperkirakan kemampuan produksi daging dalam negeri baru mampu memberikan kontribusi sekitar (70-75)% terhadap kebutuhan nasional. Artinya, hanya dalam waktu 4 tahun pemerintah bersama peternak harus mampu meningkatkan rata-rata produksi minimumnya sebesar 20% per tahun dari kondisi saat ini.

Menurut Yudi Guntara (2006) bahwa sesuai dengan asumsi perkembangan penduduk dan PDB 5%, maka jumlah kebutuhan daging PKD 2010 sebesar 666.400 ton daging sapi setara 3,3 juta ekor, atau naik sekitar 61% dari pemotongan lokal saat ini.

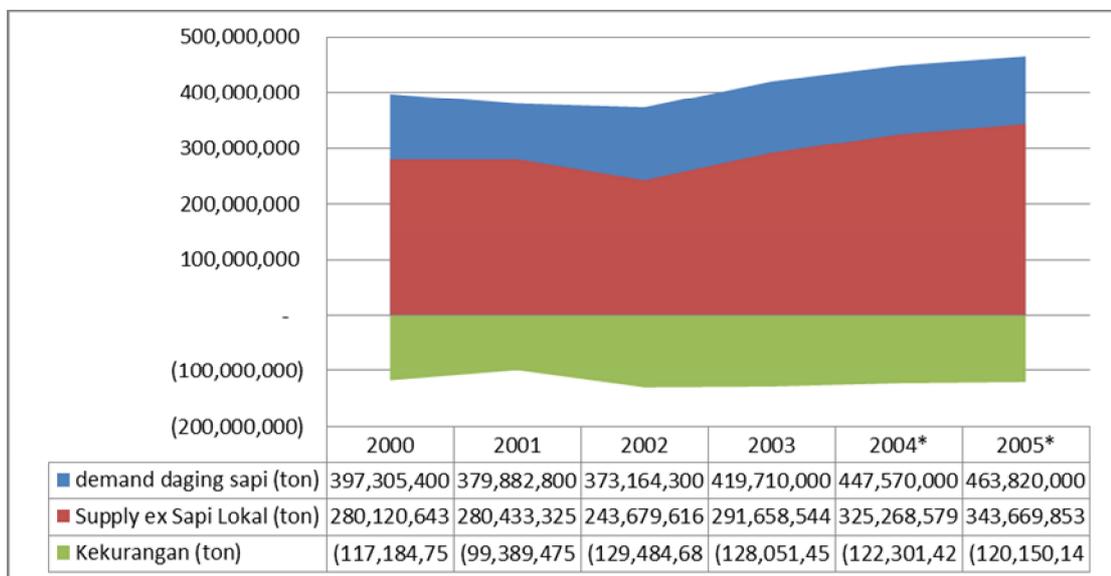
Beberapa hal yang menjadi kendala bagi keberhasilan PKD 2010, terutama ditinjau dari aspek peningkatan dan upaya pengembangan produksi yang terjadi selama ini, misalnya upaya untuk meningkatkan angka kelahiran dengan cara memperketat pengawasan terhadap pemotongan betina produktif. Peningkatan akseptor IB (Inseminasi Buatan), Pengembangan sentra pertumbuhan baru peternakan sapi potong, perlindungan pasar domestic, dan kebijakan perbankan.

Kendala-kendala tersebut akan menjadi peluang dan sekaligus dapat pula merupakan ancaman bagi keberhasilan PKD 2010. Oleh karenanya diperlukan berbagai strategi operasional untuk mengatasinya dengan keterlibatan para “stake holder” secara aktif dalam proses PKD 2010.

Kata kunci: kendala, kecukupan daging

PENDAHULUAN

Program kecukupan daging 2010 yang dirancang oleh Direktorat Jendral Peternakan mengacu kepada tiga program Departemen Pertanian yaitu: Program Pengembangan Agribisnis (PPA), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPKP) dan Program Ketahanan Pangan (PKP) dimana dalam program ini diharapkan peran produksi daging sapi dalam negeri mampu memberikan kontribusi sekitar (90-95%). Saat ini, diperkirakan kemampuan produksi daging dalam negeri baru mampu memberikan kontribusi sekitar (70-75)% terhadap kebutuhan nasional. Artinya, hanya dalam waktu 4 tahun pemerintah bersama peternak harus mampu meningkatkan rata-rata produksi minimumnya sebesar 20% per tahun dari kondisi saat ini.



Keterangan : * Berdasarkan Angka Sementara Deptan

Sumber : Yudi Guntara Noor, 2006

Berdasarkan data diatas tersebut, tampak bahwa neraca suplai dan demand terhadap daging sapi terjadi selisih yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kecenderungan kesenjangan antara *supply* dan *demand* ternyata semakin membesar. Ini artinya, tanpa pemenuhan jumlah daging dan sapi yang berasal dari impor sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh *Food Agriculture Policy Research Institute* (2002) tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Indonesian Meat Supply and Utilization

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cattle Inventories (Million Head)	11.9	12	12.2	12.3	12.6	12.9	13.3	13.7	14.1
Live Cattle Import (Thousand Head)	246	270	286	317	358	396	428	470	511
Beef and Veal (Thousand Metric Tons)	356	359	366	371	378	387	397	409	422
Production	356	359	366	371	378	387	397	409	422
Total Supply	356	359	366	371	378	387	397	409	422
Consumption	387	398	412	429	449	468	487	504	517
Net Exports	-32	-40	-46	-58	-71	-81	-89	-95	-94
Stock Change	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Use	356	359	366	371	378	387	397	409	422

Source : World Meat: FAPRI 2002 Agricultural Outlook

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa analisis FAPRI dengan Deptan menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu semakin membesarnya kebutuhan daging yang dipenuhi melalui impor daging dan sapi hidup.

Melihat fenomena tersebut, program kecukupan daging 2010, sebenarnya sangat ideal karena menyangkut hal-hal yang sangat mendasar yaitu pengembangan agribisnis, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Namun demikian, dalam implementasinya sangat diperlukan dukungan teknis, sosio (berbagai kebijakan politik) dan ekonomis yang kondusif lintas sektoral. Mengingat, menurut data empiric menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut harus mampu diatasi dalam waktu relative singkat.

PERDAGANGAN DAGING DUNIA

Dalam menentukan kebijakan kecukupan daging 2010 pertimbangan yang sangat perlu diperhatikan adalah situasi dan perkembangan perdagangan daging sapi dunia. Hal ini disebabkan, sejak Indonesia meratifikasi WTO pada tahun 1995, maka pembangunan didalam negeri akan dipengaruhi oleh perkembangan dunia.

Dari data Meat and Livestock Australia dan Livecrop Australia (2004) ternyata kontribusi Australia dalam memproduksi daging sapi sekitar 4% dari produksi dunia, tetapi mampu menguasai pangsa pasar ekspor daging dunia terbesar

sekitar 23% padahal negeri Kangguru ini hanya memiliki populasi sapi potong 29 juta ekor. Dari populasi tersebut setiap tahun dipotong sekitar 9 juta ekor (31%), menghasilkan ekspor daging sapi (Beef Export) yang berasal dari 5 juta ekor sapi (17,2%), ekspor sapi hidup sekitar 1 juta ekor (3,4%) dan untuk konsumsi domestiknya berasal dari 3 juta ekor sapi (10,4%) per tahun.

Sedangkan menurut data USDA (2005) Amerika Serikat sebagai Negara terbesar penghasil daging sapi dunia (24%), pada tahun 2004 eksportnya menurun sekitar 83% karena kasus BSE yang terjadi pada bulan Desember 2003, dan terjadi kembali pada tahun 2005. Negeri Paman Sam ini, hanya mampu menguasai pangsa pasar daging dunia sekitar 19%, sedangkan “kuda hitam” dalam perdagangan daging sapi dunia adalah; Negara-negara Amerika Latin yaitu antara lain Brazilia dan Argentina. Populasi sapi di Brazilia sekitar 168,2 juta ekor dan Argentina sekitar 55 juta ekor. Saat ini kedua Negara tersebut baru mampu mengekspor daging sekitar 900.000 ton (Brazilia) dan 373.500 ton (Argentina) setiap tahunnya.

Tabel 2. Beef and Veal Trade

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Net Exporters	Thousand Metric Tons)								
Argentina	194	280	330	322	323	326	347	362	408
Australia	137	142	147	148	153	152	147	145	143
	0	1	8	4	9	6	8	0	3
Brazil	510	575	607	752	825	841	839	820	838
China – Mainland	28	32	26	8	-16	-46	-80	-115	-142
Thailand	-3	-7	-5	-7	-12	-19	-28	-36	-37
USA	-497	-495	-507	-348	-151	30	127	239	67
Net Importers									
China-Hongkong	71	70	70	73	77	81	84	88	90
Indonesia	32	40	46	58	71	81	89	95	94
Japan	912	919	930	961	997	103	105	108	109
						1	9	2	6
Philippines	90	99	102	113	125	136	143	148	144

Source: World Meat: FAPRI 2002 Agricultural Outlook

Berdasarkan analisis FAPRI (2002) bahwa situasi perekonomian dunia, perubahan nilai tukar uang, berkembangnya penyakit ternak (PMK dan BSE) sangat berpengaruh terhadap kemampuan melakukan ekspor maupun impor daging

dari dan ke suatu Negara. Tabel 2 mengelompokkan Negara-negara yang termasuk sebagai eksportir maupun importir daging. Berdasarkan prediksi, suatu negara bisa berubah statusnya, yaitu yang awalnya sebagai importir, bisa saja dikemudian hari akan menjadi Negara pengekspor, atau sebaliknya.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, Negara eksportir yang paling memberikan pengaruhnya terhadap Indonesia yaitu China (daratan), Thailand dan USA. Hal ini disebabkan, jika China yang semula sebagai Negara surplus ternak diprediksi pada tahun ini menjadi pengimpor ternak. Demikian juga halnya Thailand, sampai dengan tahun 2001 sebagai Negara pengekspor ternak kini menjadi pengimpor ternak. Sedangkan USA diprediksi pada tahun 2007 akan sebagai Negara pengekspor daging.

Demikian pula halnya dengan Negara-negara pengimpor daging di sekitar Indonesia. Peta perdagangan ini perlu dibaca sebagai kendala yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia dalam rangka PKD 2010.

Outbreak PMK di Argentina

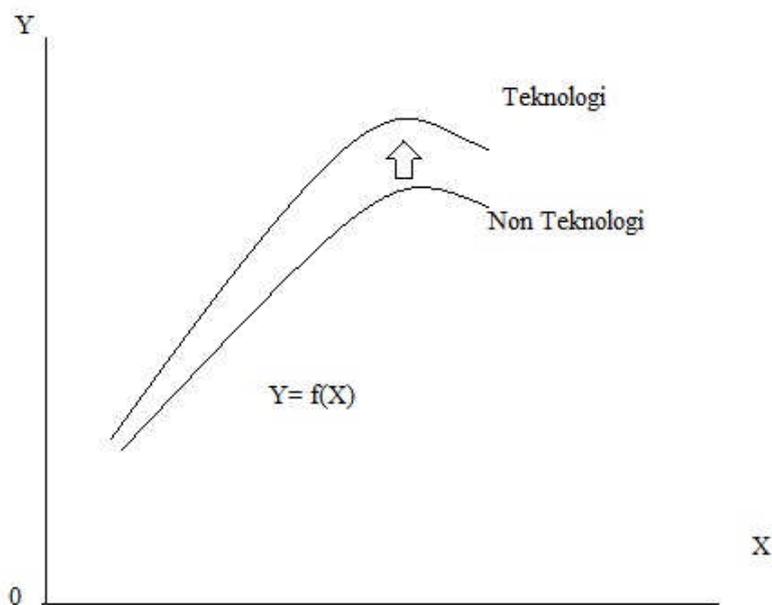
Ditemukannya penyakit BSE dan PMK di Eropa, Kanada dan Amerika Serikat beberapa tahun terakhir telah mendistorsi pasar daging dunia, bahkan telah mampu menggoncangkan Bursa Efek di New York. Kemampuan ekspor daging USA turun sekitar 83% peluang ini diambil alih oleh Australia terutama pangsa pasarnya ke Jepang dan Korea. Keunggulan Australia terutama disebabkan karena Negara ini terbebas penyakit PMK dan BSE. Jadi bukan tanpa sebab mengapa Australia telah mampu menguasai pangsa pasar terbesar dalam perdagangan sapi dunia, padahal populasi ternaknya relatif jauh lebih kecil ketimbang USA, Brazilia, dan Argentina. Sehingga sangat wajar jika Negara seperti Indonesia yang memiliki status bebas dari PMK dan BSE memiliki kesempatan besar pula dalam percaturan perdagangan internasional tersebut.

Berdasarkan informasi dari OIE ternyata Argentina pada tanggal 8 Februari 2006 yang lalu telah terjadi *out break* PMK di Provinsi Corrientes. Selanjutnya perlu diketahui bahwa zona 42 derajat lintang yang bebas PMK tanpa vaksinasi adalah Provinsi Patagonia, yang hanya memiliki populasi sapi potong 760 ribu ekor dari 55 juta ekor total populasi di Argentina, dan dipotong pertahun hanya 190 ribu ekor. Jumlah tersebut, dipasarkan ke seluruh dunia. Indonesia membutuhkan daging dengan status halal. Mungkinkah Argentina memenuhinya? Yang sangat dikhawatirkan, justru akan terjadi impor besar-besaran dari Negara-negara lain yang memiliki status zona bebas PMK, sebagai konsekuensi prinsip perdagangan

dunia. Dengan kejadian dan fenomena ini, wajar jika pemerintah Indonesia membatalkan impor daging dari Argentina.

ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN

Secara teoritis, pemenuhan program kecukupan daging 2010 adalah upaya peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini dapat dijelaskan oleh fungsi produksi sebagai berikut:



Kurva: Kemajuan Teknologi menggeser Fungsi Produksi Keatas

Fungsi Produksi: merupakan hubungan antara jumlah output maksimum yang bias diproduksi dengan input yang diperlukan guna menghasilkan output tersebut dengan **tingkat pengetahuan dan teknik tertentu** (Samuelson dan Nordhaus, 1995). Berdasarkan pada konsep dasar teori tersebut (lihat kurva) bahwa peningkatan produksi yang relatif cepat dapat dihasilkan secara signifikan melalui introduksi teknologi. Contoh kasus pada usaha penggemukan sapi potong adalah penggunaan hormon pertumbuhan. Teknologi hormone ini, mampu meningkatkan pertambahan berat badan pada usaha penggemukan sapi potong rata-rata mencapai 1,5 kg/ekor/hari. Sedangkan bagi sapi local hanya mampu menaikkan berat badannya sekitar (0,7-1,0) kg/ekor/hari. Maknanya, tanpa teknologi, produktivitas usaha tidak akan meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa faktor-faktor produksi lainnya pun masih mampu ditingkatkan dengan teknologi yang ada. Misalnya: teknologi probiotik untuk imbuhan pakan, manajemen pemeliharaan,

dsb. Ilustrasi tersebut, menyimpulkan bahwa model pengembangan/peningkatan produksi peternakan sapi potong yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen, tiada pilihan lain yaitu harus berbasis teknologi yang berkeunggulan komparatif. Prasyarat bagi penerapan teknologi ini adalah kesiapan Sumber Daya Manusia yang handal. Jadi, penerapan teknologi memerlukan pula kesiapan SMD.

Analisis Model ini memerlukan data yang akurat mengenai: struktur populasi dan koefisien teknis yang lengkap, sehingga dapat dibuat dinamika populasi. Gambaran Dinamika Populasi akan memberikan indikasi terhadap tingkat keberhasilan program pengembangan peternakan sapi potong nasional. Jika ternyata hal tersebut tidak diperoleh data yang memadai, maka untuk mengetahui kondisi peternakan sapi potong saat ini, dapat pula menggunakan pengalaman dan data empiric dengan melihat indikasi pengembangan *trend Importasi* sebagai berikut:

1. **Tahap pertama**, jika yang diimpor adalah semen beku atau *embryo transfer*. Menunjukkan bahwa pembangunan peternakan sapi potong (local), masih prospektif. Kondisi ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan mutu genetik sapi local, sehingga bobot sapi local meningkat, dampaknya terhadap jumlah sapi yan dipotong dan kualitas serta kuantitas daging yang diperoleh akan memenuhi kebutuhan permintaan.
2. **Tahap kedua**, jika yang diimpor adalah sapi betina bibit, menandakan bahwa ada gejala bibit betin sapi local mulai berkurang, dan tingkat produksi (supply) yang dihasilkannya dibandingkan dengan permintaan (demand) menunjukkan nilai negative. Kondisi ini sebagai akibat banyaknya ternak betina produktif yang turut terpotong, karena lemahnya fungsi control pemerintah di tingkat RPH, dan kuatnya permintaan akan daging. Disisi lain, pengawasan pengaliran ternak antar daerah tidak mampu mendeteksi maksud dan tujuan pengaliran ternak.
3. **Tahap ketiga**, jika yang diimpor adalah sapi bakalan penggemukan, mencirikan bahwa kemampuan suplai sapi dalam negeri (produksi sapi local) **sudah lampu kuning**. Hal ini disebabkan ketersediaan bakalan sapi local sudah sangat sulit diandalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya ditandai pula dengan bobot potong yang menurun (misalnya dari rata-rata 400 kg per ekor menjadi 300 kg per ekor), walaupun laporan pemerintah menyatakan jumlah ekornya tidak turun. Sehingga laporan ini akan mengecoh kebijakan pemerintah sendiri.

4. **Tahap keempat**, jika yang diimpor makin meningkat volumenya dalam bentuk sapi siap potong atau daging (karkas, boneless, dsb), kondisi ini **menunjukkan lampu merah** bagi pembangunan peternakan sapi potong, karena tanpa kehadiran sapi dan daging impor, pengurusan populasi sapi local akan terjadi sangat cepat. Artinya daya tarik *demand* yang sangat kuat, diimbangi kemampuan reproduksi (kelahiran) dan produksi ternak **yang sangat rendah**. Rendahnya kemampuan produksi dan reproduksi ini terutama disebabkan kondisi social ekonomu masyarakat peternak, kebijakan pemerintah, dan para pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, impor dalam bentuk daging nilai tambahnya bagi masyarakat relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sapi hidup.

KENDALA-POTENSI

Berdasarkan kepada *kendala dan potensi* yang dimiliki oleh usaha ternak sapi potong, kajian ini harus mampu merubahnya menjadi *peluan dan tantangan*. Sehingga dalam menyusun strateginya harus berbasis kepada potensi tersebut.

Potensi Pasar

Indonesia dengan 220 juta penduduknya merupakan pasar potensial bagi seluruh industry sapi potong dan daging di dunia. Seperti diketahui bahwa pangsa pasar terbesar daging sapi adalah hampir 60% dinikmati oleh industry baso. Hal ini menunjukkan bahwa segmentasi terbesar industry ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Populasi sapi potong nasional saat ini adalah sekitar 11,5 juta ekor, dan setiap tahunnya dipotong sekitar 1,5 juta ekor yang berasal dari sapi potong local dan impor dengan kontribusi 75% sapi potong local dan sisanya disubstitusi oleh sapi dan daging impor (tidak kurang dari 400 ribu ekor sapi/tahun dan daging sapi impor sekitar 50 ribu ton/tahun).

Berdasarkan prediksi Ditjen Peternakan (2006) bahwa neraca kebutuhan daging sapi yang dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan penduduk tampak pada Tabel 3. Beberapa kajian menunjukkan pula bahwa komoditi daging ini berkorelasi positif dengan pendapatan, artinya jika pendapatan masyarakat meningkat, maka konsumsinya akan meningkat pula. Sehingga kecenderungan permintaan daging ini akan terus meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi.

Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa populasi ideal pada tahun 2010 sebanyak 16.709.400 ekor.

Tabel 3. Neraca Kebutuhan Daging Sapi

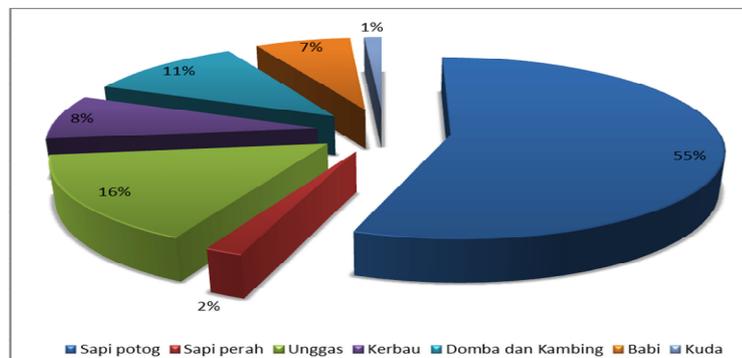
No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penduduk (juta orang)	219,7	222,9	226,3	229,7	233,2	236,7
2	Pertumbuhan penduduk (%)	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
3	Konsumsi Daging sapi (Kg/Kap/Th)	1,72	1,79	1,86	1,94	2,01	2,09
4	Konsumsi daging (000 ton)	378,93	399,66	421,52	444,58	468,90	494,55
5	Senjang Produksi (000 ton)	107,09	111,22	107,22	11,597	45,17	10,92
6	Senjang Produksi (%)	28,26	27,83	25,44	26,09	9,63	2,21
7	Setara sapi hidup (000 ek)	864,22	897,62	865,33	935,94	364,55	88,09
8	Betina Produktif (000 ek)	1.389,9	1.443,6	1.391,6	1.505,2	586,3	141,7
9	Populasi Ideal (000 ek)	11.910,1	13.468,8	14.645,2	14.938,3	15.593,9	16.709,4
10	Senjang Populasi (%)	12,58	11,48	10,10	10,75	3,85	0,85

Sumber: Badan Litbang Departemen Pertanian, 2005

Berdasarkan scenario diatas, bisa dibayangkan kalau saja pemerintah benar-benar menghentikan impor sapi dan daging dari luar negeri yang tidak diimbangi peningkatan produksi dalam negeri, maka yang akan terjadi adalah pengurasan sapi local secara besar-besaran sebagai akibat tarikan demand yang sangat tinggi. Antisipasi yang perlu diperhitungkan kemudian adalah apabila populasi tidak bertambah, tetapi angka pemotongan yang terus meningkat (karena penambahan populasi penduduk dan kesejahteraan) maka diperkirakan sapi potong di negeri ini akan habis dalam waktu 5-6 tahun. Situasi tersebut akan mendorong importasi daging secara besar-besaran dari Negara di luar Australia yang mengandung resiko masuknya berbagai penyakit ternak, atau sangat berpeluang masuknya kembali daging illegal ke negeri ini.

Potensi Peternakan Rakyat

Menurut Sensus Pertanian (1993), ternyata jumlah peternakan sapi potong



Ilustrasi 2: Rumah Tangga Peternak di Indonesia (Sensus Pertanian Th.1993)

sangat dominan dibandingkan dengan peternak lainnya (lihat ilustrasi 2). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka juga merupakan petani.

Namun demikian, eksisting kondisi peternakan rakyat sapi potong pada umumnya produktivitasnya masih sangat rendah yang ditunjukkan oleh kemampuan kenaikan berat badan berkisar antara (0,7-1) kg/ekor/hari pada usaha penggemukan, dengan skala usahanya hanya (2-4) ekor, polanya tradisional yang cenderung untuk memenuhi kebutuhan (belum berorientasi ekonomi) dan masih terkonsentrasi di daerah padat penduduk (Pulau Jawa dan Bali). Oleh karenanya, upaya peningkatan populasi ternak sapi potong, berarti pula melakukan pemberdayaan peternak rakyat. Untuk itu keberhasilan PKD 2010 akan sangat ditentukan pula oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan peternak rakyat.

STRATEGI KECUKUPAN DAGING

Dalam konsep PKD 2010, komitmen dasarnya adalah “*Strategi peningkatan produksi dan kesejahteraan peternak dalam penyediaan pangan*”, **bukannya** ketersediaan pangan yang didukung peningkatan produksi untuk kesejahteraan peternak. Komitmen ini mengandung makna bahwa peningkatan produksi dan kesejahteraan peternak merupakan strategi kunci pemerintah khususnya bagi Departemen Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan), kekurangan pemenuhan kebutuhan pangan secara bertahap masih memerlukan impor sapi dan daging.

Konsekuensi terhadap program yang telah dicanangkan tersebut, diperlukan pengorbanan dan kerja keras yang cukup besar guna mencapai harapan bagi program kecukupan daging pada Tahun 2010. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian guna menunjang keberhasilannya, terutama dari aspek peningkatan dan upaya pengembangan produksi yang terjadi selama ini. Misalnya, upaya untuk meningkatkan angka kelahiran dengan cara memperketat pengawasan (dengan menerapkan sanksi) terhadap pemotongan betina produktif yang masih cukup tinggi. Peningkatan akseptor IB (inseminasi buatan) paling tidak harus mencapai angka 3 juta ekor per tahun, di setiap pusat-pusat produksi sapi potong guna menjaga keseimbangan dan peningkatan populasi didalam negeri hingga tidak menimbulkan dampak negative bagi pembangunan pertanian dan pedesaan secara luas. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Aspek Teknis: Perbibitan

Dalam aspek perbibitan umumnya kebijakan masih bersifat “top down”, sumber-sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah

sehingga menyulitkan pembinaan, pengumpulan dan distribusi bibit dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, kelembagaan perbibitan yang ada seperti halnya kelompok usaha perbibitan masih dirasakan belum memadai, misalnya, belum berkembangnya usaha perbibitan yang professional oleh peternak, kelompok peternak atau koperasi dan swasta. Lemahnya daya jangkau layanan UPT perbibitan, karena sebaran ternaknya yang luas. Hal lain yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bibit adalah tingginya pemotongan ternak betina produktif, menurut laporan dari Ditjen Peternakan tidak kurang dari 200.000 ekor pertahun betina produktif dipotong.

Untuk meningkatkan produksi, pilihan yang selama ini dilakukan *dengan cara IB*, hanya mungkin dilakukan di wilayah-wilayah padat penduduk dengan skala 2-3 ekor atau cara alami dengan prasyarat *tersedianya padang penggembalaan*. Penggunaan bangsa sapi pilihan yang disukai peternak rakyat seperti “*Simental, Brahman dsb*” di daerah sentra-sentra pengembangan produksi (diluar wilayah pemurnian) untuk memenuhi kemampuan peningkatan produksi masih dapat dilakukan. Sehingga tidak lagi harus memperhatikan bangsa sapi apa yang akan terbentuk kemudian, yang lebih diutamakan berapa keuntungan atau efisiensi yang akan diperoleh peternak terhadap sejumlah output produksi daging yang akan dihasilkan.

Untuk menentukan jumlah kelahiran per tahun, harus diketahui struktur populasi ternak yang ada. Struktur tersebut berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2003 yang tampak pada Tabel 4.

Tabel 4. Struktur Populasi Sapi Potong (Sensus, 2003)

Populasi Sapi Potong	100%	10,504,128 (ekor)
Dewasa	54.30%	5,703,742
Jantan	18.43%	1,051,200
Betina	81.57%	4,652,542
Muda	26.50%	2,783,594
Jantan	56.14%	1,562,710
Betina	43.86%	1,220,884
Anak	19.20%	2,016,793
Jantan	48.65%	981,170
Betina	51.35%	1,035,623

Pada Tabel 4, tampak bahwa struktur populasi kondisinya tidak merata, jumlah jantan dewasa yang merupakan tulang punggung supply daging nasional hanya 1.051.200 ekor (pemotongan ternak local tahun 2003 sebesar 1.402.689

ekor), oleh karenanya merupakan hal yang wajar jika kasus pemotongan betina produktif terjadi karena timpangnya struktur populasi. Jumlah betina dewasa produktif menjadi syarat utama sebagai sumber bibit, disamping jumlah sapi muda dan anak sebagai '*replacement stock*'.

Jika saja akseptor IB dapat dilakukan terhadap 3 juta ekor **dengan asumsi** bahwa: program ini merupakan tambahan dari eksisting yang berjalan dengan tingkat kelahirannya dan mampu hidup sebanyak 50% (1,5 juta ekor). Dari sejumlah anak yang dilahirkan tersebut akan mampu menghasilkan jantan (50%) dan betina (50%). Maka paling tidak program ini setahun akan menghasilkan *bakalan sapi jantan 750.000 ekor*.

Kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan alamiah ini adalah masih banyaknya betina produktif yang dipotong. Secara praktis, semua mengetahui cara penanggulangannya, yaitu membeli betina tersebut dan mengembalikannya kepada peternak. Persoalannya, konsep tersebut ternyata sangat sulit di implementasi di lapangan. Penyebab utamanya, tidak ada dana yang cukup dan sapi pengganti untuk dipotong di RPH.

Pakan (Pemanfaat hasil ikutan)

Sejarah perkembangan peternakan (sejak zaman penjajahan colonial Belanda) menunjukkan bahwa; Pusat produksi usaha peternakan sapi potong berada di kantong-kantong produksi usaha tani. Hal ini, membuktikan bahwa ternak merupakan sumber tenaga kerja dan pupuk bagi usaha tani. Secara umum dapat dikatakan bahwa peternakan merupakan penunjang bagi usaha tani. Konsekuensinya, ternak akan diberi pakan yang berasal dari hasil ikutan produksi pertanian. Untuk itu, diperlukan kecerdasan petani/peternak dalam meningkatkan kualitas pakan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas usahanya.

Dalam puluhan tahun terakhir sejak era orde Baru, pertanian telah berkembang ke arah industry (seperti sawit, coklat, kelapa dsb). Hasil ikutan yang diperoleh pun melimpah ruah dan cenderung terbuang percuma. Berbeda dengan sejarah yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu. Kini, karena tenaga kerja ternak dapat digantikan oleh mesin (mekanisasi), ternak tidak lagi berkembang di kawasan industry pertanian tersebut. Sementara ternak berkumpul di sentra produksi pertanian rakyat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, sentra-sentra baru pengembangan ternak sapi potong tampaknya bisa beralih ke wilayah-wilayah tersebut (contoh di

Provinsi Lampung Industri nanas dengan sapi penggemukan memanfaatkan limbah nanas). Melalui pengembangan kesisteman, model-model seperti itu perlu terus dipacu dan dikembangkan pada jenis usaha tani lainnya. Misalnya pola SSKA (Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit) harus terus dikembangkan sehingga bisa diimplementasi diseluruh kawasan perkebunan kelapa sawit. Demikian pula dengan CLS (Crop Livestock System) untuk padi, LISIS (Livestock Sugarcane Integration System) untuk usaha tani tebu/gula dan SLTP (Sustainable Livestock Techno Park) untuk kawasan pertanian lahan kering dsb. Kesemua model ini, memerlukan pendekatan teknis, sosio dan ekonomis yang komprehensif sehingga akan tumbuh dan berkembang sumber-sumber pertumbuhan baru sapi potong.

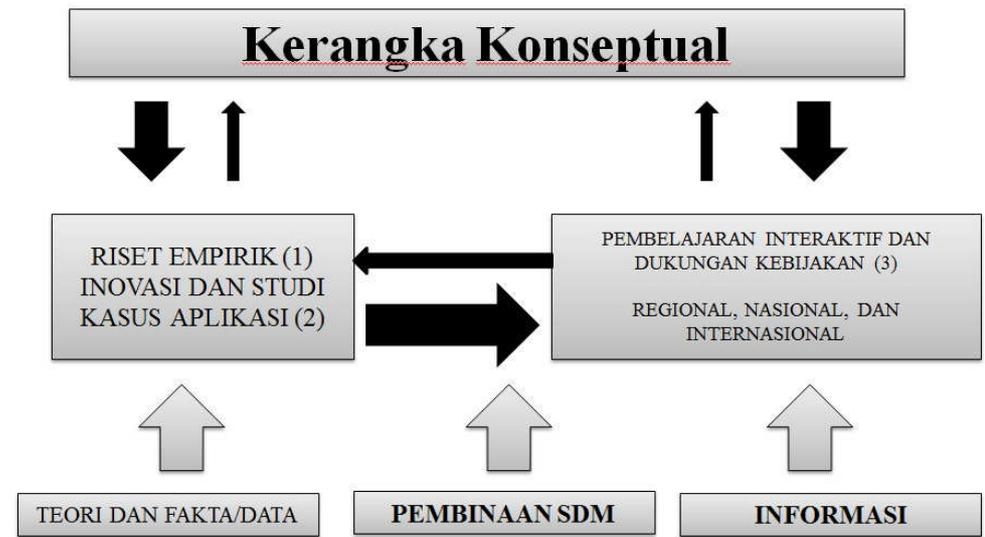
Pemanfaatan hasil ikutan pertanian, dengan introduksi imbuhan pakan (bioteknologi) dan sentuhan alat dan mesin pertanian masih belum terdengar akrab dilakukan oleh peternakan. Misalnya untuk meningkatkan skala usaha, para peternak harus mampu menyediakan pakan sepanjang musim tanpa masalah. Tanpa sentuhan teknologi telah menyebabkan skala usaha ternak sapi potong rakyat tidak pernah meningkat selama puluhan tahun terakhir.

Berbagai fenomena diatas merupakan indikasi telah terjadinya “*missing link*” dari suatu sistem “*biocyclo farming*” yang akan menurunkan produktifitas pertanian dalam jangka panjang. Oleh karenanya, sentra-sentra pengembangan industri pertanian harus bersinergi dengan pengembangan peternakan.

Aspek Kebijakan dan Kultural

Kelemahan kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan peternakan, hingga kini masih bersifat “top down”. Kebijakan seperti ini pada akhirnya menyulitkan berbagai pihak terutama para stake holder. Pertanyaanya “Bagaimana membuat kebijakan public yang didasarkan pada riset akademik, dengan melibatkan para stakeholder dan pembuat kebijakan, melalui forum-forum dialog, dan kemudian mendorong hasilnya untuk diagendakan dalam kebijakan nasional, regional, dan internasional”?

Menurut Reardon T. and Huang J (2005), kebijakan public seperti itu dapat digunakan analisis regoverning market dengan langkah seperti pada Ilustrasi berikut:



Ilustrasi 3. Langkah Regorvening Market

Dalam konsep tersebut, ada tiga langkah utama yang harus ditempuh untuk menghasilkan kebijakan publik yang handal yaitu:

1. Melakukan riset empiric, mengenai kerangka konsep yang akan diajukan sebagai suatu kebijakan. Misalnya, dalam kaitannya PKD 2010 telah melakukan kajian terhadap kegagalan program swasembada daging on trend dan pembangunan RPH bantuan JBIC dsb.
2. Melakukan inovasi dan aplikasi studi kasus. Apakah dalam PKD 2010, telah dilakukan hal tersebut?
3. Pembelajaran interaktif dan dukungan kebijakan. Sepertinya dukungan kebijakan terhadap PKD 2010 masih dirasakan sangat kurang, terutama dari instansi lain diluar Departemen Pertanian.

Walaupun secara teknis kemampuan pengembangan peternakan telah banyak dilakukan, tetapi bila tidak didukung secara politis maupun sosio budaya (kultural) tentu akan tiada artinya. Oleh karenanya beberapa kebijakan komprehensif yang harus di sosialisasi sehingga secara kultural mampu mendukung PKD 2010 antara lain:

Pengembangan di sentra-sentra pakan

Untuk mendapat kawasan pertumbuhan baru pengembangan peternakan sapi potong di sentra-sentra pakan (industry pertanian yang berpotensi menghasilkan ikutan pakan), perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan (politis) dari

pemerintah dengan imbalan (rasio) antara lahan usaha dengan populasi ternak yang diperlukan untuk menjaga siklus biologis wilayah. Beberapa kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak perlu dilakukan sosialisasi bagi kawasan-kawasan yang potensial, sehingga akan dapat diimplementasikan,

Perlindungan pasar domestic

Potensi pasar domestic perlu mendapat “perlindungan” terhadap kemungkinan serbuan impor sebagai konsekuensi dari berlakunya pasar bebas di negeri ini. Jika pemerintah mampu melakukan perlindungan terhadap pasar dalam negeri, artinya produksi peternakan sapi potong rakyat *akan menjadi tuan di negerinya*. Hal ini, ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang ada masih berpihak kepada peluang memperbesar importasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen bukannya meningkatkan kemampuan produsen. Artinya, kebijakan yang ada di dalam negeri tidak bersifat “*equal treatment*” dengan peternak (competitor) di luar negeri. Contoh kasus SK Mentan 745 tentang pemisahan daging dan jeroan, kebijakan zona bebas PMK serta larangan penggunaan hormone sementara daging yang diimpor menggunakan hormone pertumbuhan. Untuk itu diperlukan inventarisasi berbagai kebijakan yang ada mulai dari UU No.6/1967 tentang peternakan dan kesehatan hewan, PP, SK Mentan, SK Dirjen bahkan sampai kepada berbagai Peraturan Daerah yang menyangkut pengembangan peternakan sapi potong.

Kebijakan Otonomi Daerah

Program tersebut diatas, tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama, a berbagai pihak secara lintas sektoral. Selain itu, dukungan SDM yang memadai merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar, untuk peningkatan implementasi berbagai teknologi adaptif di tingkat aparat pelaksana sampai di lapangan (peternakan rakyat). Pola usaha ternak sapi potong rakyat haruslah mulai di arahkan kepada sifat industry peternakan, tidak lagi bersifat *Kalanganan* (hobby/kesukaan dan tabungan) semata, karena peternakan rakyat yang akan dijadikan tulang punggung keberhasilan dari PKD 2010.

Berbagai kebijakan tingkat nasional tersebut kemudian akan bertumpu pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan peternakan. Oleh karenanya, kebijakan di tingkat daerah harus mampu menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan peternakan. Banyak kasus dilaporkan akibat ketidaksiapan pemerintah Kabupaten/Kota yang menyebabkan usaha peternakan sapi potong dirugikan.

3. Aspek Ekonomis :

Dukungan kebijakan ekonomi (finansial dan perbankan) menjadi sangat mutlak diperlukan untuk keberhasilan Program Kecukupan Daging 2010, karena biaya yang dibutuhkan akan mencapai triliunan rupiah. Misalnya prosedur perbankan dengan bunga yang kondusif diberikan kepada para peternak (tidak melebihi 5%), dan insentif kemudahan memperoleh fasilitas bagi usaha perbibitan (misalnya, kebijakan subsidi lapangan/tidak langsung).

Jika dilihat kasus pemanfaatan dana KKP peternakan beberapa tahun yang lalu sekitar 60% terserap di program penggemukan sapi potong. Realitanya hingga kini program inti-plasma boleh dikatakan berhenti. Penyebab utamanya, selain karena tidak menguntungkan (suku bunga yang relatif tinggi), volume per paketnya hanya mampu untuk 3 ekor karena kenaikan harga sapi yang semula Rp.4 juta/ekor, kini sekitar Rp.5-6 juta/ekor belum termasuk biaya-biaya lainnya. Padahal seharusnya paket kredit kepada peternak tidak kurang dari 10 ekor. Dalam hal ini, diperlukan kepekaan Pemerintah dalam menata ulang system perkreditan yang akan diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Konsep kecukupan daging komitmen dasarnya adalah “*Strategi peningkatan produksi dan kesejahteraan peternak dalam pentediaan pangan*”, **bukannya** ketersediaan pangan yang didukung peningkatan produksi untuk kesejahteraan peternak. Komitmen ini mengandung makna bahwa peningkatan produksi dan kesejahteraan peternak merupakan strategi kunci Pemerintah khususnya bagi Departemen Pertanian (Direktorat Jendral Peternakan), kekurangan pemenuhan kebutuhan pangan secara bertahap masih harus dipenuhi oleh impor sapi dan daging.
2. PKD 2010 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengimplementasian aspek:
 - a. Pertimbangan perkembangan global sapi potong dunia yang akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan peternakan sapi potong didalam negeri.
 - b. Teknologi dan SDM yang handal dalam bidang: Inseminasi Buatan, dan model pemanfaatan hasil ikutan hijauan pakan.

- c. Aspek kebijakan dan kulturak: pengembangan sentra-sentra pertumbuhan baru, perlindungan pasar dalam negeri, mengkaji ulang berbagai kebijakan, dan otonomi daerah.
- d. Aspek ekonomis: dukungan perbankan dalam kebijakan operasional fasilitas kredit bagi perbibitan dan penggemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Food Agriculture Policy Research Institute (2002) *World Meat: Agricultural Outlook*, USDA.
- Paul A. Samuelson dan Willian D. Nordhauss (1995) *Mikro Ekonomi*, edisi ke 14. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- PPSKI (2004), *Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR RI*.
- Reardon Thomas and Huang Jikun (2005). *Regoverning Market*, Workshop Regorvening Markets and Metodology. 27-30 August 2005. Amsterdam.
- Tawaf Rochadi dan Ahmad Firman (2005). *Evaluasi Pembangunan Peternakan tahun 2005 di Jawa Barat*. Fakultas Peternakan Unpad, Bandung.
- Tawaf Rochadi (2004). *Perspektif Industri Penggemukan Sapi Potong Impor (Feedlot) di Indonesia*. Fakultas Peternakan Unpad, Bandung.
- Tjeppy D. Soedjana (2006). *Strategi dan Kebijakan Pencapaian Program Kecukupan Daging 2010*. Direktorat Jenderal Peternakan Jakarta.
- Yudi Guntara (2006). *Program Kecukupan Daging 2010 (PKD 2010) Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot*.